



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
TERNATE**

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Ternate Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2025 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran dilaksanakan kegiatannya pada Triwulan III, dan IV dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Ternate, Juli 2025

Kepala SKIPM Ternate



Arsal, S.St.Pi, M.P

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	6
2.1. CAPAIAN KINERJA	7
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	8
2.3. REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN	
NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025	5
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM Ternate Triwulan II Tahun 2025	6
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 1 Pada Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 2 Pada Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 3 Pada Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 03.1 Pada Triwulan II Tahun 2025	16
Tabel 2.6	Target dan Realisasi IKS 03.4 Pada Triwulan II Tahun 2025	17
Tabel 2.7	Target dan Realisasi IKS 03.7 Pada Triwulan II Tahun 2025	19
Tabel 2.8	Target dan Realisasi IKS 03.9 Pada Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 2.9	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	21
Tabel 2.10	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjajaku	6

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SKIPM Ternate pada Triwulan II Tahun 2025 adalah Sebesar 114,25%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

- A. Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2025, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 7 Target IKU pada Triwulan II yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:
1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
  2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
  3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
  4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
  5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)
  6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
  7. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan II 2025 baru mencapai **Rp. 1.004.702.597,-** atau **37.43%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.684.228.000,-**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi dan target kinerja SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

SKIPM Ternate sebagai salah satu UPT Badan Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab sebagai *quality assurance* yaitu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan baik dari hulu hingga hilir. Salah satu tugasnya adalah melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, tangkapan maupun penanganan dan pengolahan.

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit pembudidaya ikan, unit penangkapan ikan, pakan ikan, obat ikan, unit penanganan dan pengolahan ikan hingga distribusi hasil perikanan. Untuk Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan surveilan dan monitoring dalam rangka memastikan konsistensi penerapan sistem di unit tersebut.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh inspektur mutu BPPMHKP. Output dari penjaminan tersebut berupa sertifikat pengendalian di unit penanganan dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB kapal), Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) dan *Health Certificate* (HC) / Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Selain itu BPPMHKP juga melaksanakan tugas kegiatan monitoring pencemaran residu dan bahan berbahaya di perairan umum, monitoring kesegaran ikan di Pelabuhan perikanan / tempat pendaratan ikan dan pasar ikan, penjaminan mutu (*quality assurance*) di Lokasi Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan Maju / Modern (Kalaju/Kalamo), traceability produk hasil tangkap dan hasil budidaya di unit usaha.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate dibantu Oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) dan 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sebanyak 2 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas PPNPN sebanyak 7 orang dan Petugas PJLP sebanyak 4 orang. Adapun struktur organisasi SKIPM Ternate sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

### 1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan & Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	70
14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	88		

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan II 2025 sudah sangat baik / istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 114,25% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 114,25. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan II Tahun 2025 ini belum mencapai target semua Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan II tahun 2025 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan II Tahun 2025

## 2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rincian capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Triwulan II Tahun 2025 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM Ternate Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI TW II	%
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	70	100	120
		2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yg Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	70	100	120
		3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	99	100	101,01
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan & Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)	75	-	-
		5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)	75	-	-
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92	99,70	117,29
		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)	71,5	-	-
		8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	100	-	-
		9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Ternate (Indeks)	87	84,62	112,83
		10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86	-	-
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	85	-	-
		12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	76	100	120
		13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT SKIPM Ternate (%)	70	-	-
	14. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT SKIPM Ternate (Nilai)	88	96,09	109,19	

## 2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail sesuai indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2025 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

### Sasaran Program 1.

*Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif*

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara profesional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Ternate.

#### IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator penting dalam menjamin bahwa aktivitas pembenihan, pembesaran, maupun penanganan hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal), dan Cara Pembenihan yang baik (CPIB). Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian 100% menunjukkan bahwa satu unit usaha yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan. Pada periode ini, PT. Morotai Marine Culture yang berlokasi di Desa Ngele Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai berhasil memperoleh Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk ruang lingkup pembenihan kerang mutiara.

Keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan mutu yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi sebagai prasyarat daya saing produk. Implikasinya, sektor produksi primer di wilayah ini semakin siap menjadi fondasi bagi pembangunan perikanan yang berkelanjutan, aman pangan, dan memiliki akses ke pasar yang lebih luas baik domestik maupun ekspor.

Dengan Target Kegiatan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer total 70% pada Tahun 2025 terdiri dari:

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan: Sertifikat
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): 1 Sertifikat
3. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB): 2 Sertifikat

Dan Realisasi Kegiatan:

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): 1 Sertifikat

Capaian Indikator: Persentase Pengukuran capaian indicator menggunakan rumus berikut:

$$\%X = \frac{A + B + C + D + E + F}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*)

Sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate sebagai berikut dan terdapat pada Tabel 2.2:

$$\%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Pada Triwulan II Tahun 2025, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor produksi primer mencapai target 100%. Sertifikasi yang diterbitkan berupa Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) atas nama PT. Morotai Marine Culture untuk ruang lingkup pembenihan kerang mutiara, yang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif sesuai standar nasional.
- Dengan diterbitkannya sertifikat CPIB tersebut, maka persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM Ternate pada Triwulan II tercatat sebesar 100%.
- Selain itu, capaian ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam penerapan sistem jaminan mutu di tingkat hulu perikanan, serta komitmen pelaku usaha pembenihan di Maluku Utara untuk terus memenuhi ketentuan teknis dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Ternate	70	70	100	120	120

## IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Standar ini meliputi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), *Codex Alimentarius*, dan standar perdagangan lainnya.

Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan

mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi, survailan dan Monev HACCP, Inspeksi dan surveilan SKP, CBIB, CPIB, CPIB Kapal, SPDI.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Sehingga keberhasilan capaian ini juga menjadi refleksi dari semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan standar mutu dalam setiap tahapan pasca panen. Implikasinya tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi sektor perikanan di wilayah Maluku Utara.

#### **Realisasi Kegiatan :**

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 4 Ruang Lingkup

$$\%x = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

2. Rekomendasi : 12 dan SKP Terbit : 12

$$\%x = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

#### **Capaian Indikator :**

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate sebagai berikut dan terdapat pada Table 2.3:

$$\%x = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

$$\%x = \frac{100\% + 100}{2} \times 100\% = 100\%$$

- Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh target kegiatan terkait sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan berhasil tercapai dengan capaian 100%. Sertifikasi ruang lingkup HACCP untuk produk hasil perikanan telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian pula, penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala UMKM dan menengah-besar yang telah menerapkan prinsip GMP dan SSOP juga mencapai target 100%.

- Secara keseluruhan, persentase hasil kelautan dan perikanan pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM Ternate tercatat sebesar 100%.
- Selain itu, pada periode ini juga terdapat beberapa UPI yang mengajukan perpanjangan sertifikasi, yang menunjukkan adanya kesinambungan dan komitmen pelaku usaha dalam mempertahankan standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)	70	70	100	120	120

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II sudah tercapai, sedangkan untuk target keseluruhan di 2025 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

### IKS.3. Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu Dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Pada Triwulan II Tahun 2025, rasio ekspor ikan dan hasil perikanan dari wilayah kerja Stasiun KIPM Ternate kembali menunjukkan performa maksimal dengan capaian 100%, di mana seluruh produk perikanan yang diekspor diterima sepenuhnya oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan data ekspor periode April-Juni 2025, tercatat total volume ekspor mencapai 233.015 kg dan 4.091 ekor, dengan total frekuensi pengiriman sebanyak 51 kali, serta nilai ekonomi yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp2.355.690.374.826. Komoditas utama yang diekspor meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin, Kepiting Bakau Hidup, Udang Ronggeng, Frozen Squid, dan Frozen Vannamei Shrimp. Negara tujuan ekspor utama pada periode ini adalah Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan.

Tingginya rasio penerimaan ekspor tanpa penolakan menunjukkan bahwa produk perikanan dari Maluku Utara telah memenuhi standar teknis dan higienitas yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pengawasan mutu, efisiensi sistem inspeksi dan sertifikasi, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk. Implikasinya, kepercayaan negara mitra dagang terhadap produk perikanan Indonesia semakin menguat, mendorong kelangsungan dan perluasan pasar ekspor, serta memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dan nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh sistem pengawasan mutu yang konsisten, termasuk inspeksi fasilitas dan pengujian laboratorium terhadap parameter mikrobiologi, kimia, dan cemaran bahan berbahaya. Seluruh pengiriman berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari negara tujuan, yang menandakan tingginya kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan dari wilayah Maluku Utara. Seluruh hasil ekspor pada TW II Tahun 2025 diterima dengan baik oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa produk perikanan dari wilayah Maluku Utara telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional, serta meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap komoditas perikanan Indonesia. Dengan presentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus berikut:

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Ket:

X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Realisasi Kegiatan :

1. Jumlah Ekspor Mutu produk hasil perikanan TW 2 Tahun 2025 sebanyak 51 kali
2. Negara Tujuan Ekspor Vietnam, Singapura, Korea Selatan

Maka Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yaitu:

$$x = \frac{51 - 0}{51} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate TW II Tahun 2025 yang tercapai 100% menunjukkan bahwa seluruh produk perikanan yang diekspor berhasil memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan, inspeksi, survailan dan sertifikasi yang dilakukan. Implikasinya, kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, khususnya Maluku Utara, semakin meningkat, membuka peluang ekspor yang lebih besar, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IKS.3 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu Dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	99	99	100	101,01	101,01

### IKS.3.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

#### 1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
  - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

#### 2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per-bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

### 3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender ( pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

### 4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.
- c. Penyampaian LPJ melalui dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

### 5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

#### 6. Penyelesaian Tagihan

- Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti dan mengisi dengan lengkap uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP.

#### 7. Penyerapan Anggaran

- Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV(90%).
- Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan yaitu:
  - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
  - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

#### 8. Retur SP2D

- Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

#### 9. Perencanaan Kas

- Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian Renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

#### 10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Sehingga pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini 99,70 dari target TW II 85 atau mencapai 117,29% karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 98 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.3 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	98	85	99,70	117,29	117,29

#### IKS.3.4 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro

SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mengukur kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

- a. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- b. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- c. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;
- d. Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja Indeks 84,62 % sebagai berikut:

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IKS.3 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II	%	% Thd Target Tahunan
			Realisasi		
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87	75	84,62	112,83	112,83

### IKS.3.7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada Aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun anggaran 2025, formula dan ketentuannya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHP AMBON	1.650.694.000	1.031.308.000	628.386.000	0	628.386.000	100.00%
32	STASIUN KIPMHP TERNATE	429.629.000	316.664.000	112.965.000	0	112.965.000	100.00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHP	6.406.394.000	3.693.415.000	2.714.969.000	0	2.714.969.000	100.00%
34	BALAI KIPMHP TARAKAN	1.645.435.000	1.490.679.200	154.755.800	0	154.755.800	100.00%
35	STASIUN KIPMHP PEKANDARU	2.140.551.000	1.748.549.000	392.002.000	0	392.002.000	100.00%
36	BALAI KIPMHP LAMPUNG	1.470.733.574	525.392.250	945.341.324	0	945.341.324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHP	44.427.579.000	37.526.741.000	6.900.838.000	397.042.000	7.297.980.000	105.75%
	<b>TOTAL</b>	<b>117.224.732.574</b>	<b>74.786.968.652</b>	<b>42.318.573.722</b>	<b>397.042.000</b>	<b>42.715.615.722</b>	<b>100.94%</b>



Ditandatangani Secara Elektronik

Sofiyanto

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini 100 dari target TW II 76 atau mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 76 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IKS.03.7 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Ternate	76	76	100	120	120

### IKS.3.9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPT Lingkup BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 94,42 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,78 dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”.
2. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 3 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu:
  - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
  - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)
  - Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)

Sehingga Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

**Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merak	99.73	99.73	100.00	99.73	99.19	100.00	99.73	99.73	100.00	99.76	A	Sangat Baik	93
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	99.51	99.51	99.51	98.04	99.51	98.04	99.02	99.02	98.04	98.91	A	Sangat Baik	51
4	Stasiun KIPM Gorontalo	98.31	98.99	98.65	98.65	98.31	98.31	98.65	98.65	98.65	98.57	A	Sangat Baik	74
5	Balai KIPM Banjarmasin	98.89	98.58	98.26	98.10	98.42	98.42	98.58	98.58	98.58	98.49	A	Sangat Baik	158
6	Balai KIPM Ambon	99.00	99.33	97.67	97.33	98.67	98.33	98.33	99.00	98.33	98.44	A	Sangat Baik	75
7	Stasiun KIPM Sorong	99.60	99.19	98.79	89.52	100.00	98.79	99.19	100.00	97.98	98.12	A	Sangat Baik	62
8	Balai KIPM Jayapura	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	A	Sangat Baik	9
9	Stasiun KIPM Pontianak	99.12	97.37	98.68	97.81	99.12	95.18	94.74	95.61	96.05	97.08	A	Sangat Baik	57
10	Balai KIPM Medan I	97.06	97.06	97.06	96.32	97.06	96.32	97.06	97.79	97.06	96.98	A	Sangat Baik	34
11	Balai KIPM Jakarta II	97.45	97.96	96.43	96.94	95.92	97.45	97.45	97.45	95.41	96.94	A	Sangat Baik	49
12	Stasiun KIPM Merauke	95.59	97.06	94.12	94.12	97.06	98.53	97.06	100.00	98.53	96.90	A	Sangat Baik	17
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	96.96	95.75	96.56	97.27	96.26	95.55	95.14	97.87	96.46	96.42	A	Sangat Baik	247
14	Stasiun KIPM Ternate	96.30	96.30	96.30	96.30	96.30	95.37	95.37	96.30	96.30	96.09	A	Sangat Baik	27

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator ini 96,09 dari target TW II 88 atau mencapai 109,19% karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 88 tiap Triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi IKS.03.9 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Triwulan II		% Thd Target Tahunan
	2025	Target	Realisasi %	
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	88	88	96,09	109,19

### 2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.649767/2025 sebesar Rp. 2,684,228,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.469.996.000,- dan PNPB sebesar Rp. 214.232.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Ternate pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp. 533,680,732 atau sebesar 19.88%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Ternate T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,334,228,000	972,969,597	41,68
2	Pengendalian Mutu	205,000,000	24,233,00	11,82
3	Manajemen Mutu	145,000,000	7,500,000	5,17
<b>TOTAL</b>		<b>2,684,228,000</b>	<b>1,004,702,597</b>	<b>37,43</b>

Tabel 2.10. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Belanja Pegawai	1,004,917,000	506,060,600	50,36
2	Belanja Barang	1,679,311,000	498,641,997	29,69
3	Belanja Modal	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2,684,228,000</b>	<b>533,680,732</b>	<b>19,88</b>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan II disebabkan pencapaiannya ada yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan II adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait hasil capaian dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai target kinerja.
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan II.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depannya.





## Laporan Kinerja Triwulan II 2025